# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.Tinjauan Kesejahteraan Sosial

### 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai ilmu pengatahuan atau bagian dari disiplin ilmu akademis yang mempelajari berbagai kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, serta berbagai pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Ilmu kesejahteraan sosial sama halnya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk mengidentifikasi berbagai masalah sosial, penyebabnya, serta upaya-upaya penangannya.

Kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010:1) merupakan salah satu disiplin keilmuan di bidang sosial yang berorientasi membantu individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang memuaskan. Fokus utama dari ilmu kesejahteraan sosial ini adalah mencegah, mengatasi, dan mengurangi masalah-masalah sosial selain itu juga yang membedakannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain adalah dalam hal keberfungsian sosial. Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2010:1). sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi diatas bermakna bahwa Kesejahteraan sosial merupakan salahsatu bagian dari kesejahteraan yang dilakukan secara terorganisir dan secara profesional,yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga Swasta yang memiliki tujuan untuk mencegah, mengatasi berbagai masalah sosial. Definisi lain mengenai kesejahteraan sosial menurut Midgley dalam Isbandi (2005 : 15-16) adalah “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”. Menurut definisi tersebut menggambarkan suatu keadaan atau kondisi sejahteraa manusia, dimana terdapat 3 komponen yang saling mempengaruhi antara satu sama lainnya, yaitu masalah sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan tercukupi, dan kesempatan sosial dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu: kondisi kehidupan sejahtera, institusi, dan aktivitas. Maksud konsep yang pertama adalah terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, yaitu sebagai bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. ketiga, yakni kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa, materil maupun spritual akan meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya, jika seluruh pemenuhan kebutuhannya telah tercukupi. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial ini merupakan penyempurnaan ilmu disiplin sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya latar belakang sejarah dari kesejahteraan sosial itu sendiri merupajan cikal bakal munculnyas profesi pekerjaan sosial. Adapun definisi Pekerjaan Sosial sebagai berikut :

Pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38) adalah “Aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Menurut definisi di atas bahwa pekerjaan sosial adalah profesi yang dilakukan secara profesional untuk menolong baik individu, kelompok, maupun masyarakat pada umumnya untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam lingkungan tempat tinggalnya.

### 2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10), mempunya tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan yang pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khusunya dengan masyarakat di lingkungnganysa, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10), yaitu :

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

### 2.1.3.Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial baru. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 12) sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan *(Development)*

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang *(Support)*

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

### 2.1.4. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Secara subtantif bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin (2012:11) bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

a. Kesejahteraan anak dan keluarga.

b. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.

c. Kesejahteraan orang lanjut usia.

d. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services).*

e. Pelayanan rekreasional.

f. Pelayanan sosial koreksional.

g. Pelayanan kesehatan mental.

h. Pelayanan sosial medis.

i. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat.

j. Pelayanan sosial bagi wanita.

k. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

### 2.1.5. Usaha Ksejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya disebut pelayanan sosial seperti yang dikemukakan oleh Jones (1990) dalam Soeharto (2010:8): “Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya.” Makna tersebut tidak hanya merujuk pada kemiskinan fisik saja, seperti rendahnya pendapatan atau rumah yang tidak layak huni, melaikan emncakup berbagai bentuk masalah sosial yang terkait dengannya, seperti anak terlantar, pekerja anak, *human trafiking*, dan sebagainya.

## 2.2. Tinjauan Masalah Sosial

### 2.2.1.Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kondisi yang tidak sesuai seperti yang diharapkan atau bahakan tidak sesuai dengan nilai, norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial karena menimbukan berbagai penderitaan dan kerugian baik secara fisik maupun secara non fisik. Masalah sosial menurut Weinberg (1981:4) dalam Soetomo (2010:7) bahwa masalah sosial adalah:

Situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dimana dari definisi tersebut memiliki tiga unsur penting yaitu:

1. Suatu situsi yang dinyatakan

2. Warga masyarakat yang signifikan

3. Kebutuhan akan tinakan pemecahan masalah.

Definisi diatas dapat dikemukakan bahwa suatu masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk mengedakan perubahan dan perbaikan terhadap keadaan tersebut, agar terciptanya suatu kondisi keidupan yang lebih diharapkan dan kondisi yang sejahtera. Dan dari unsur di atas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai suatu maslah sosial jika gejala tersebut didefinisikan dan diidentifikasikan sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Weinberg melihat bahwa maslaah sosial sebagai hasil dari pemaksnaan masyarakat. Sedangkan Kartono (1992:2) dalam Huraerah (2011:4) berpandangan bahwa yang disebut masalah sosial yaitu:

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Definisi di atas bahwa suatu masalah sosial di anggap masalah apabila hal tersebut dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat melanggar adat-istiadat dalam warga masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dengan demikian bahwa adat istiadat dan kebudayaan tersebut memiliki nilai pengontrol terhadap tingkah laku dalam anggota masyarakat.

### 2.2.2. Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomis yang salah satunya adalah kemiskinan. Dalam Huraerah (2011:83) masalah sosial memiliki 4 karakteristik, yaitu:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut faham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenagkan.Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenagkan senantiasa menut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai dipebincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan memalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

### 2.2.3.Komponen Masalah Sosial

Banyak komponen agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Parillo yang dikutip dari Soetomo (1995:4) dalam Huraerah (2011:5) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.

b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.

c. Merupakan pelanggan terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.

d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

## 2.3. Tinjauan tentang pemberdayaan

### 2.3.1.Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Definisi Pemberdayaan menurut Suharto (2010:58) yaitu:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekan bahwa orang memperoleh keterlampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut pengertian di atas Pemberdayaan adalah proses dimana orang mempunyi rasa yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam keterampilan yang dimilikinya, pengetahuan yang dimilikinya, serta kekusaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan sekitarnya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, selain sebagai mahluk sosial keluarga juga merupakan tahap pertama dalam bersosisalisasi dalam proses setiap individu. Selain hal tersebut, keluarga juga memiliki peranan dalam hal pemberdayaan keluarga, dimana keluarga juga bisa menjadi wadah pemberdayaan terhadap anggota keluarganya, sehingga keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan dapat menjamin kesejahteraan bagi keluarganya. Pemberdayaan keluarga menurut Adit pada https://www.kemsos.go.id (Selasa, 18 April 2017) menyatakan :” pemberdayaan keluarga adalah proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelembagaan, keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga”.

### 2.3.2. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Dubois dan Miley dalam Huraerah (2011:107) :

1. Membangun relasi pertolongan yang: (1) memfleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
2. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berpokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Mereflesikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan professional; riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (Suharto, 2005:68).

### 2.3.3.Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting):mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2005:66-67):

1. Aras Mikro, Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### 2.3.4.Tingkatan Pemberdayaan

Sudah saatnya pradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintahan sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan drajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat merupakan menurut Susiladiharti (2002) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs).
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
4. Tingkat keberdayaan keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan yang kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

### 2.4. Tinjauan tentang kemandirian

## 2.4.1. Pengertian Kemandirian

Kata kemandirian berasal dari kata dasar *diri* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an* yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self* (Brammer dan Shostrom,1982) karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.

Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan bergantung pada orangtua dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga waktu tertentu. Seiring dengan berlaunya waktu dan perkembangan selanjutnya, seorang anak perlahan-lahan akan melepaskan diri dari kebergantungannya pada orangtua atau orang lain di sekitarnya dan belajar untuk mandiri. Hal ini merupakan suatu proses alamiah yang dialami oleh semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemandirian dalam konteks individu tentu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik.

Kemandirian, menurut Sutari Imam Barnadib (1982), meliputi “perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain". Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali (1987) yang mengatakan bahwa kemandirian adalah “hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri". Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian:

1. Keadaan seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya,
2. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi,
3. Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya,
4. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya

Robert Havighurst (1972) menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Emosi, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak bergantung kepada orang tua.
2. Ekonomi, aspek ini ditunjukan dengan kamampuan mengatur ekonomi dan tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orangtua.
3. Intelekual, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi
4. Sosial, aspek ini ditunjukan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bargantung atau menunggu aksi dari orang lain.

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, dan individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya mampu berpikir dan bertindak sendiri. Dengan kemandiriannya, seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang dengan lebih mantap.

Untuk mandiri, seseorang membutuhkan kesempatan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di sekitarnya, untuk mencapai otonomi diri sendiri. Pada saat ini peran orangtua dan respons dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai “penguat” untuk setiap perilaku yang telah dilakukannya. Hai ini sejalan dengan apa yang dikatakan Reber (1985) bahwa: “kemandirian merupakan suału sikap otonomi bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, seorang remaja diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

### 2.4.2. Proses Perkembangan Kemandirian

Kemandirian, seperti halnya kondisi psikologis lain, dapat berkembang dengan baik jika diberikankesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan, dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak.

Mengingat banyaknya dampak positif bagi perkembangan individu, kemandirian sebaiknya diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai kemampuannya. Seperti telah diakui, segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan dapat dihayati dan akan semakin berkembang menuju kesempurnaan. Latihan kemandirian yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan usia anak.

### 2.4.3. Tingkatan dan karakteristik kemandirian

Sebagai suatu dimensi psikologis yang kompleks, kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkatan tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang juga berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkatan perkembangan kemandirian tersebut. Lovinger mengemukakan tingkatan kemandirian beserta ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Tingkatan pertama, adalah tingkatan implusif dan melindungi diri.

Ciri-ciri tingkatan ini adalah:

1. Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain.
2. Mengikuti aturan secara oportunistik dan hedonistik.
3. Berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir secara (*stereotype*)
4. Cenderung melihat kehidupan sebagai *zero-sum game*
5. Cenderung menyalahkan dan mencela oranglain serta lingkungannya.
6. Tingkatan kedua, adalah tingkatan konformistik.

Ciri-ciri tingkatan ini adalah

1. Peduli terhadap penampilan diri penerima sosial
2. Cenderung berpikir *stereotype* dan klise
3. Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal
4. Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian
5. Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya intropeksi
6. Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal
7. Takut tidak diterima kelompok
8. Tidak sensitif terhadap keindividualan
9. Merasa berdosa jika melanggar aturan
10. Tingkatan ketiga, adalah tingkat sadar diri

Ciri-ciri tingkatan ini adalah:

1. Mampu berpikir alternatif
2. Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi
3. Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada.
4. Menekankan pada pentingnya pemecahan masalah
5. Memikirkan cara hidup
6. Penyesuaian terhadap situasi dan peran
7. Tingkatan keempat, adalah tingkat saksama(*conscientious*)

Ciri-ciri tingkatan ini adalah:

1. Bertindak atas dasar nilai-nilai internal,
2. Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan.
3. Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan prespektif diri sendiri maupun orang lain
4. Adar akan tanggung jawab
5. Mampu melakukan kritik dan penilaian diri
6. Peduli akan hubungan mutualistik
7. Memiliki tujuan jangka panjang
8. Cenderung melihat peristiwa dalam kintek global
9. Berpikir lebih kompleks dan atas dasar pola analistik
10. Tingkatan kelima, adalah tingkatan individualistis.

Ciri-ciri tingkatan ini adalah:

1. Peningkatan kesadaran individualitas
2. Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan
3. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan oranglain.
4. Mengenal eksistensi perbedaan individual.
5. Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan
6. Membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya
7. Mengenal kompleksitas diri
8. Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial.
9. Tingkatan keenam, adalah tingkat mandiri

Ciri-ciri tingkatan ini adalah

1. Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan
2. Cenderung bersikap realistik dan objektif terhaadap diri sendiri maupun orang lain
3. Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial
4. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yangbertentangan
5. Toleran terhadap *ambiguitas*
6. Peduli akan pemahaman diri (*self-fulfilment*)
7. Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal
8. Responsif terhadap kemandirian oranglain
9. Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan oranglain.
10. Mampumengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan

## 2.5. Tinjauan Tentang UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

### 2.5.1. Pengertian UPPKS

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana. UPPKS merupakan wadah pembelajaran untuk mengenal usaha skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, khusus KPS dan KS artinya, UPPKS berusaha mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

### 2.5.2. Tujuan UPPKS

Tujuan kelompok UPPKS untuk memberdayakan Ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi.

2) Mendorong peranan wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha.

3) Meningkatkan dinamika kehidupan keluarga.

4) Meningkatkan peran serta keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dilingkungannya.

5) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga.

6) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan.

### 2.5.3. Pokok-Pokok Kegiatan UPPKS

Pokok-pokok kegiatan yang dilaksanakan kelompok UPPKS meliputi beberapa hal berikut:

1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tujuannya adalah membuktikan kepedulian dan komitmen berbagai unsur pembangunan untuk mengembangkan partisipasi dan pelaksanaan pembinaan keluarga sejahtera, informasi yang disampaikan terkait dengan pembangunan keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga bidang ekonomi, kegiatan UPPKS, pengorganisasian UPPKS, penerapan teknologi tepat guna, permodalan, pemasaran, dan wirausaha.

2) Pendataan Keluarga Sejahtera Dilakukan bersama masyarakat untuk memperoleh data lengkap mengenai tingkat kesejahteraan keluarga sehingga segera dapat diambil langkahlangkah berikutnya.

3) Bimbingan Usaha Ekonomi Produktif Jenis bimbingan meliputi: pelaju keluarga (“olah, jual, dan untung oleh keluarga”). Pemaju keluarga (proses, kemas, jual, dan untuk oleh keluarga), dan jasa seperti salon kecantikan, tukang banten, dan tukang pijat.

4) Kemitraan Usaha Kelompok kerja nasional di tingkat desa yang lebih tinggi berusaha mencarikan mitra usaha kerja yang berupa sub kontrak, waralaba dagangan umum dan usaha bersama.

### 2.5.4. Sumber permodalan UPPKS

Pada dasarnya, setiap kegiatan kelompok UPPKS diharapkan pada akhirnya untuk mandiri, namun dengan demikian BKKBN dapat memfasilitasi bantuan modal usaha yang bersumber dari berbagai pihak antara lain dari swadaya, APBN/APBD, Perbankan, BUMN/BUMD, dan dana program pemerintah, sektor Swasta/CSR. Untuk bisa memperoleh bantuan modal usaha, kelompok UPPKS harus terdaftar dalam Databasis kelompok UPPKS, Agar dana dimanfaatkan secara bertanggungjawab, maka bantuan/ kredit modal diupayakan ke kelompok UPPKS penerima bantuan / kredit yang benar-benar mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif dan dikelola sebaik-baiknya.

### 2.5.5 Sistem Pembinaan UPPKS

Pembinaan pada kelompok UPPKS diharapkan dapat dilaksanakan oleh BKKBN bekerjasama dengan Lintas sektor terkait, baik Pusat ataupun Daerah, Perguruan tinggi, dan Lembaga pemberdayaan masyarakat. PLKB / PKB, kader KB dan pendamping yang berkemampuan untuk memotivasi kelompok UPPKS sangat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha dan meningkatkan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS, karena unsur-unsur tersebut berhubungan langsung dan sebagai petugas lini lapangan terdepan dalam membina dan mendampingi usaha UPPKS. Keberhasilan usaha kelompok UPPKS menjadi bahan pembinaan bagi para pembina yang pada akhirnya mengarahkan anggota kelompok menjadi peserta KB mandiri, peserta KB Lestari dan menjadi motivator KB diwilayahnya.

### 2.5.6.Landasan Hukum UPPKS

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang–Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Peraturan Presiden Nomor 15 TAhun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan emiskinan.
4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor ; 15/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningakatan Pendapatan Keluraga Sejahtera (UPPKS).

## 2.6. intervensi pekerjaan sosial dalam pemberdayaan keluarga

### 2.6.1. pengertian pekerjaan sosial

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yakni fokus dalam mengembalikan keberfungsian sosial manusia baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengtan kata lain pasti perlu adanya suatu profesi yang ahli dalam menangani guna mewujudkan kondisi sejahtera. Sehingga profesi pekerjaan sosial hadir untuk mewujudkan apa yang diinginkan tersebut. Menurut Zastrow (1999) dalam Edi Suharto (2014:24) definisi pekerjaan sosial adalah :

Aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut defenisi di atas, bahwa Pekerjaan sosial adalah kegiatan yang dilakukan secara profesional untuk membamtu individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mengembangkan ataupun memperbaiki kemampuan mereka, agar dapat mencapai apa yang diharapkannya.

Pekerjaan sosial pada umumnya memiliki tiga unsur utama yang tidak bisa dipisahkan yaitu pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, dan ketiganya digunakan dalam proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial. Siporin dalam Fahrudin (2014: 61) medefinisikan pekerja sosial sebagai:

Metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Siporin juga menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktis teknis ilmiah, dan fungsi-fungsi inti dan pelayanan pertolongan khusus dalam sistem kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh anggota profesi pekerjaan sosial.

Dari definisi yang disampaikan oleh Siporin dalam Fahrudin di atas dapat ditari kesimpulannya bahwa pekerjaan sosial adalah lembaga sosial yang berfungsi dan bertujuan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam melakukan proses pertolongan dan pelayanan kepada penerima bantuan kesejahteraan sosial seorang pekerja sosial harus memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

### 2.6.2. Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial pada dasarnya memiliki tujuan untuk membantu, individu, kelompok, maupun masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, selain itu pula seorang pekerjaan sosial memiliki tugas untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang sehingga orang tersebut dapat hidup lebih baik kembali. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) yang dikutip oleh Fahrudin (2014: 66) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia *(human well-being)* dan membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang rawan, tertindas, dan miskin. Tujuan pekerjaan sosial menurut NASW dalam Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2014) adalah :

a. Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.

b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesemapatan.

c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.

d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain itu Zastrow dalam Fahrudin (2014) juga menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE), sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

b. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.

c. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan ketrampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.

d. Mengembangkan dan menerapakan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Menurut pengertian di atas menurut Zastrow yang dikutip Fahrudin bahwa tujuan utama dari profesi Pekerjaan sosial adalah untuk membantu seseorang baik individu, kelompok maupun masyarakat agar kehidupan mereka lebih baik, dapat mencapai apa yang diharapkan oleh dirinya, melalui berbagai penelitian, pemberdayaan, maupun pengetahuannya sehingga mereka dapat hidup sebagai mahluk sosial seutuhnya.

### 2.6.2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dan dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang telah memiliki berbagai keahlian yang didapatkan melalui kegiatan pendidikan. Seorang pekerja sosial dalam melakukan kegiatannya atau melakukan berbagai kegiatan pelayanan sosial memiliki berbagai macam-macam kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsinya, seperti dikemukakan oleh Siporin (1975) dalam Huraerah (2011: 39-40) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan akses *(access service),* mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya mmebantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

### 2.6.3. Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial banyak orang tapi memprioritaskan pada masalah pemenuhan pada anggota masyarakat yang rentan. Tujuan utama profesi pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik idividu maupuan kelompok dan membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas, dan miskin. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Zastrow yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 66), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.

3. Memperbaiki kefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.

4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Maksud dari tujuan pekerjaan sosial di atas adalah untuk membantu dan memperbaiki individu, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami masalah agar mereka memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Selain dari ke empat tujuan di atas, Zastrow (2008) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadailan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

### 2.6.4. Peran Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Keluarga

Seorang pekerjaan sosial harus mampu melaksanakan berbagai peran dalam hal pemberdayaan masyarakat (keluarga), seorang pekerjaan sosial dituntut mampu melaksanakan berbagai keahlian-keah yang mendukung dalam pemberdayaabn masyarakat tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kelmpok masyarakat tersebut dapat tercapai. Peran pekerja sosial menurut Sukoco (2011:22) adalah sebagai berikut:

1. Sebagaipemercepat perubahan (*Enabler)*

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan agar kapasitasnya mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

1. Peranan sebagai perantara (*Broker)*

Peran sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan masyarakat.

1. Pendidik (*educator*)

Dalam menjelaskan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

1. Tenaga ahli (*expert*)

Dalam berkaitan sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat).

1. Perencanaan Sosial (social planner)

Seseornag perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat, menganalisa sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat.

1. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimuluskan atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

### 2.6.5. Teknik-teknik dalam Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial di dalam menjalankan profesinya memiliki bermacam-macam teknik tertentu. Menurut Iskandar (2013: 32-34) mengemukakan bahwa teknik-teknik tersebut antara lain adalah:

a. *Small Talk*, yaitu suatu teknik yang berhubungan dengan percakapan yang tidak langsung. *Small talk* digunakan pada saat permulaan kontak antara pekerja sosial dengan klien. Dalam situasi krisis, ketika perasaan sedang meninggi maka small talk tidak dapat dipergunakan.

b. *Ventilation*, yaitu suatu teknik untuk membawa klien kepada suatu permukaan dan sikap yang diperlukan. Tujuan dari ventilation adalah untuk menjernihkan emosi yang tertekan karena emosi yang tertekan dapat merupakan penghalang bagi suatu gerakan yang positf. Dengan membantu klien menyatakan perasaannya, pekerja sosial akan lebih siap melaksanakan tindakan pemecahan serta dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan suatau perubahan terhadapa klien.

c. *Support,* yaitu teknik pemberian semangat atau dorongan untuk menumbuhkan tingkah laku positif dari klien dengan dukungan terhadap aspk-aspek tertentu seperti internal.

d. *Reassurance*, teknik ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan kepada klien bahwa situasi yang dia perjuangkan akan dapat dicapai dan dia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Teknik ini juga dapat dipergunakan dengan menghormati atau mengahrgai kemampuan-kemampuan, perasaan dan pencapaian yang diupayakan oleh klien, dan hal ini penting untuk menumbuhakan kepercayaan klien terhadap pekerja sosial.

e. *Confrontation*, teknik ini dipergunakan apabila pekerja sosial menilai begiu sedikit kemajuan dalam mencapai tujuan kasus, atau apabila klien menolak untuk menyadari dan menerima suatu kenyataan. Karenanya *confrontation* ini dapat digunakan dengan cara menciptakan kecemasan dan tekanan-tekanan dalam situasi tertentu dengan maksud menimbulkan motivasi perubahan seperti yang diharapkan.

F. *Conflik*, yaitu suatu tipe stress yang terjadi bila seseorang termotivasi oleh dua atau lebih kebutuhan yang saling bertentangan. Karena konflik merupakan himpunan kesepakatan, berlawanan atau beradu, maka pekerja sosial harus mengetahui cara menggunakan teknik ini.

### 2.6.6. Tahapan-tahapan Intervensi Pekerjaan sosial

Seorang pekerja Sosial profesional dalam melakukan proses pertolongannya akan melalui beberapa tahapan, tahapan tersebut bertujuan agar proses pertolongannya berjalan dengan lancar, sehingga perubuhan yang diinginkan dapat tercapai. Tahap-tahap intervensi (proses pertolongan) pekerjaan sosial menurut Iskandar (2013: 65-68) adalah:

a. Tahap Engagment, Intake dan Kontrak

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerjaan sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi ertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Dan pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien.

b. Tahap Assesment

Assesment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan klien (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam tahap assesment ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap lengkap.

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil assesment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial. Garis besar rencana intervensi meliputi:

1. Fokus/akar masalah.

2. Tujuan pemecahan masalah klien serta indikator-indikator keberhasilannya.

3. Sistem dasar praktek, yang meliputi sistem klien, sistem sasaran, sistem pelaksana kegiatan, dan sistem kegiatan.

4. Pokok-pokok program kegiatan pemecahan masalah.

5. Metode-metode pertolongan yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada klien.

d. Tahap Melaksanakan Program

Berdasarkan rencana intervensi di atas, selanjutnya pekerja sosail mulai melaksanakan program kegiatan masalah yang telah dibuat oleh pekerja sosial dengan klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini pekerja sosial juga harus melibatkan klien secara aktif dalam setiap tahapan.

e. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi yaitu pekerja sosial mengevaluasi semua pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan , kegagalan atau hambatan-hambatanyang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuaan hasil dan tujuan proses.

f. Tahap Terminasi (Pemutusan Kegiatan Pertolongan)

Tahap terminasi adalah tahap yang dilakukan bilamana tujuan perolongan dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasana-alasan rasional klien meminta pengakiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.